



RTP

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN MANAJEMEN PENGENDALIAN RESIKO

<https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/manajemen-resiko-2022/>



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAPUAS HULU

Jalan Danau Luar No. 01 Telp. (0567) 21359 Website: satpolpp.kapuashulukab.go.id
Email: satpolpp@kapuashulukab.go.id
PUTUSSIBAU - 78711

2022

**RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAPUAS HULU
TAHUN 2022**

Nama OPD	: Satuan Polisi Pamong Praja
Alamat	: Jalan Danau Luar No. 01 Putussibau
Nama Pimpinan	: BAHTIAR, S.P., M.Si.
Visi	: Terwujudnya Kapuas Hulu yang Harmonis, Energik, Berdaya Saing, Amanah dan Terampil
Misi	: 1. Misi 1 : Mewujudkan Masyarakat Kapuas Hulu yang Harmonis dalam Kerukunan Kehidupan Beragama, Budaya dan Keamanan 2. Misi 4: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, dan Tersedianya Infrastruktur Publik yang Berbasis Transparansi, Responsibilitas dan Akuntabilitas
Tujuan	: 1. Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Publik 2. Mantapnya Ketentraman dan Ketertiban yang Mengarah Kepada Kondisi yang Aman dan Kondusif
Anggaran Tahun 2021	: 9.602.011.770,00
Anggaran Tahun 2022	: 10.170.541.260,00
Jumlah Program	: 2 Program
Jumlah Kegiatan	: 7 Kegiatan
Jumlah Sub Kegiatan	: 32 Sub Kegiatan

Kode			Nama Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Merupakan Program/Kegiatan Utama
Prog.	Keg.	Sub Keg.		
1	2	3	4	5
01			Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	
01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	
01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	
01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	

Kode			Nama Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Merupakan Program/Kegiatan Utama
Prog.	Keg.	Sub Keg.		
1	2	3	4	5
01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
01	2.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	
02			Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
02	2.01	01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	√
02	2.01	02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	√
02	2.01	03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	√
02	2.01	04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	√
02	2.01	05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	√
02	2.01	09	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada	√
02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	
02	2.02	01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	√
02	2.02	02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	√
02	2.02	03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	√

REGISTER RESIKO
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAPUAS HULU
TAHUN 2022

FORM MR-

No	Sasaran	Indikator	Risiko Teridentifikasi	Pemilik Resiko	Faktor Penyebab		
					Sumber (Internal/Eksternal)	Controllable / Uncontrollable	Uraian Penyebab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Belum Cairnya TPP dan Tunsus	Sub Bagian Keuangan	Eksternal	Controllable	Regulasi TPP baru terbit April 2022 dan Lap. Patroli merupakan syarat pencairan
2	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Sampai dengan bulan Maret belum melakukan pencairan Alat Listrik	Sub Bagian Umum & Aparatur	Internal	Controllable	Tidak ada kebutuhan baru terkait alat listrik
3	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Sampai dengan bulan Maret belum melakukan pencairan Makan Minum Kantor	Sub Bagian Umum & Aparatur	Internal	Controllable	Terjadi Pengurangan Jumlah Anggaran Makan Minum yang akan dipaketkan
4	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Sampai dengan bulan Maret belum melakukan pencairan Cetak & Penggandaan	Sub Bagian Umum & Aparatur	Internal	Controllable	Sudah diajukan, dan sedang dalam proses
5	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Sampai dengan bulan Maret belum melakukan pencairan Perbaikan Peralatan Kantor	Sub Bagian Umum & Aparatur	Internal	Controllable	Belum ada Service
6	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Sampai dengan bulan Maret belum melakukan pencairan ATK	Sub Bagian Umum & Aparatur	Internal	Controllable	Pengajuan di April Kontrak belum di paket
			Sampai dengan bulan Maret belum melakukan pencairan Honor Petugas Aduan		Internal	Controllable	Pembayaran 4 bulan, jadi di bulan 5 pembayaran
7	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Sampai dengan bulan Maret belum melakukan pencairan STNK	Sub Bagian Umum & Aparatur	Internal	Controllable	Belum ada pajak yang dibayar jatuh tempo
8	Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini,	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini,	Baru Triwulan I namun Realisasi Kasus pelanggaran Perda sudah mencapai 104,17%	Bid. Penegakan & Operasi	Internal	Controllable	Banyaknya Laporan Kasus yang telah masuk
9	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan	Belum merealisasikan kegiatan Pelatihan Dalmas	Bid. Peningkatan Kapasitas Personil	Internal	Controllable	Terbatasnya Instruktur
10	Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman,	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan	Koordinasi antar instansi belum maksimal	Bid. Penegakan & Operasi	Internal	Controllable	Ego Sektoral

No	Sasaran	Indikator	Risiko Teridentifikasi	Pemilik Resiko	Faktor Penyebab		
					Sumber (Internal/Eksternal)	Controllable / Uncontrollable	Uraian Penyebab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
11	Terlaksananya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok	Kurangnya Ketaatan Masyarakat terhadap Perda	Bid. Penegakan & Operasi	Internal	Controllable	Kurangnya Sosialisasi dan tingkat pemahaman masyarakat yang tidak merata
12	Terlaksananya Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung	Tidak Adanya Tenaga PPNS	Bid. Peningkatan Kapasitas Personil	Internal	Controllable	Terbatasnya SDM dan Anggaran
13	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Peralatan dan Perlengkapan Operasional Belum memadai (HT, Senter, Mobil Dalmas, Borgol, alat kejut listrik, pistol gas)	Sub Bagian Umum & Aparatur	Internal	Controllable	Keterbatasan anggaran
14			Perda 1978 yang sudah tidak relevan dengan kehidupan Sosial Kemasyarakatan	Bid. Penegakan & Operasi	Internal	Controllable	Proses revisi perda membutuhkan waktu dan biaya
15			Tingkat minat masyarakat untuk menjadi anggota Linmas sangat kurang	Bid. Perlindungan Masyarakat	Eksternal	Controllable	Tidak ada gaji, resiko kerja tinggi, dan performa tidak menarik
16	Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kurangnya peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan	Bid. Perlindungan Masyarakat	Eksternal	Controllable	Adanya pemahaman masyarakat bahwa trantibum merupakan hanya tugas dan tanggungjawab Polri, TNI, dan Satpol PP Malu menggunakan atribut Linmas Keterbatasan anggaran untuk melaksanakan kegiatan
17			Tidak adanya peralatan dan perlengkapan Linmas	Bid. Perlindungan Masyarakat	Eksternal	Controllable	Keterbatasan Anggaran
18	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Tingkat Minat Anggota Pol PP untuk mengikuti Tes Jabatan Fungsional tidak ada	Bidang Peningkatan Kapasitas Personil	Internal	Controllable	Sebagian anggota jafung kesulitan mendapatkan angka kredit Menempatkan posisi korlap yang sedikit, sementara banyak jafung yang dapat menjadi korlap
19			Anggota tidak hadir mengikuti kegiatan Kesamaptaan/ Dalmas	Bid. Peningkatan Kapasitas Personil	Internal	Controllable	Tingkat Kedisiplinan sangat kurang Pemahaman dan tanggung jawab tentang pekerjaan tidak dipahami
20	Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Anggota Linmas Desa tidak pernah menyampaikan Laporan Kegiatan	Bid. Perlindungan Masyarakat	Eksternal	Controllable	SDM rendah Kurangnya anggaran

No	Sasaran	Indikator	Risiko Teridentifikasi	Pemilik Resiko	Faktor Penyebab		
					Sumber (Internal/Eksternal)	Controllable / Uncontrollable	Uraian Penyebab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
21			Proses pencairan anggaran yang belum dipahami	Sub Bagian Keuangan	Internal	Controllable	BA: Permintaan dari pejabat pengadaan Sudah dicek, tidak di sampaikan kembali
22			Pencairan perjalanan dinas lambat	Sub Bagian Keuangan	Internal	Controllable	

Sumber: <https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/evaluasi-kinerja-2022/>

Putussibau, Maret 2022

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KAPUAS HULU,

BAHTIAR, S.P., M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19671010 199703 1 007

Keterangan :

Kolom (2) : diisi dengan Sasaran

Kolom (3) : diisi dengan Indikator Sasaran

Kolom (4) : diisi dengan risiko yang berpotensi menghambat pencapaian masing-masing sasaran

Kolom (5) : diisi dengan siapa pemilik resiko (bidang/bagian)

Kolom (6) : diisi dengan "Internal/Eksternal"

Kolom (7) : diisi dengan "Controllable/Uncontrollable"

Kolom (8) : diisi dengan faktor penyebab yang menjadi akar permasalahan.

FORM PENILAIAN RESIKO
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAPUAS HULU
TAHUN 2022

FORM MR-2

No	Risiko Teridentifikasi	Tingkat Kemungkinan	Tingkat Dampak	Level Risiko	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Belum Cairnya TPP dan Tunsus	2	3	6	Rendah
2	Sampai dengan bulan Maret belum melakukan pencairan Alat Listrik	2	2	4	Sangat Rendah
3	Sampai dengan bulan Maret belum melakukan pencairan Makan Minum Kantor	3	2	6	Rendah
4	Sampai dengan bulan Maret belum melakukan pencairan Cetak & Peggandaan	3	2	6	Rendah
5	Sampai dengan bulan Maret belum melakukan pencairan Perbaiki Peralatan Kantor	3	2	6	Rendah
6	Sampai dengan bulan Maret belum melakukan pencairan ATK	3	3	9	Rendah
	Sampai dengan bulan Maret belum melakukan pencairan Honor Petugas Aduan	3	4	12	Sedang
7	Sampai dengan bulan Maret belum melakukan pencairan STNK	3	2	6	Rendah
8	Baru Triwulan I namun Realisasi Kasus pelanggaran Perda sudah mencapai 104,17%	3	5	15	Sedang
9	Belum merealisasikan kegiatan Pelatihan Dalmas	3	3	9	Rendah
10	Koordinasi antar instansi belum maksimal	4	4	16	Tinggi-Dimitigasi
11	Kurangnya Ketaatan Masyarakat terhadap Perda	4	4	16	Tinggi-Dimitigasi
12	Tidak Adanya Tenaga PPNS	5	5	25	Sangat Tinggi-Dimitigasi

No	Risiko Teridentifikasi	Tingkat Kemungkinan	Tingkat Dampak	Level Risiko	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13	Peralatan dan Perlengkapan Operasional Belum memadai (HT, Senter, Mobil Dalmas, Borgol, alat kejut listrik, pistol gas)	4	3	12	Sedang
14	Perda 1978 yang sudah tidak relevan dengan kehidupan Sosial Masyarakat	5	4	20	Sangat Tinggi-Dimitigasi
15	Tingkat minat masyarakat untuk menjadi anggota Linmas sangat kurang	4	3	12	Sedang
16	Kurangnya peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan	4	3	12	Sedang
17	Tidak adanya peralatan dan perlengkapan Linmas	4	4	16	Tinggi-Dimitigasi
18	Tingkat Minat Anggota Pol PP untuk mengikuti Tes Jabatan Fungsional tidak ada	3	3	9	Rendah
19	Anggota tidak hadir mengikuti kegiatan Kesamaptaan/ Dalmas	4	3	12	Sedang
20	Anggota Linmas Desa tidak pernah menyampaikan Laporan Kegiatan	5	3	15	Sedang
21	Proses pencairan anggaran yang belum dipahami	2	4	8	Rendah

No	Risiko Teridentifikasi	Tingkat Kemungkinan	Tingkat Dampak	Level Risiko	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
22	Pencairan perjalanan dinas lambat	3	3	9	Rendah

Keterangan :

Kolom (2) : diisi dengan risiko dari sheet sebelumnya

Kolom (3) : diisi dengan range skor 1-5

1. Hampir Tidak terjadi
2. Jarang terjadi
3. Kadang terjadi
4. Sering terjadi
5. Hampir pasti terjadi

Kolom (4) : diisi dengan nilai pada skala berikut ini:

1. Tidak Signifikan
2. Minor
3. Moderat
4. Signifikan
5. Sangat Signifikan

Kolom (5) : merupakan hasil perkalian kolom (3) x kolom (4)

Kolom (6) : deskripsi status risiko yaitu ; Sangat tinggi/tinggi/sedang/rendah/sangat rendah

Putussibau, Maret 2022

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KAPUAS HULU,

BAHTIAR, S.P., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19671010 199703 1 007

**KEGIATAN PENGENDALIAN RESIKO
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAPUAS HULU
TAHUN 2022**

FORM MR-3

No	Risiko (Prioritas)	Kegiatan Pengendalian Yang Sudah ada	Kegiatan Pengendalian		Penanggung Jawab	Target Waktu/ Link Evidence
			Respon Risiko	Rencana Kegiatan Pengendalian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Belum Cairnya TPP dan Tunsus		Dikelola	Mengirim surat ke kecamatan terkait persyaratan pencaitan Tunsus & Share Grup WA	Sub Bagian Umum & Aparatur	April
2	Sampai dengan bulan Maret belum melakukan pencairan Alat Listrik		Dikelola	Pencairan dibulan Juli	Sub Bagian Umum & Aparatur	Juli
3	Sampai dengan bulan Maret belum melakukan pencairan Makan Minum Kantor	Sudah menyusun DPA Penyempurnaan	Dikelola	Pencairan dibulan April	Sub Bagian Umum & Aparatur	Mei
4	Sampai dengan bulan Maret belum melakukan pencairan Cetak & Pengandaan	Sudah diajukan dan sedang dalam proses	Dikelola	Dilaksanakan Bulan April	Sub Bagian Umum & Aparatur	April
5	Sampai dengan bulan Maret belum melakukan pencairan Perbaiki Peralatan Kantor	Bulan April sudah memperbaiki AC	Dikelola	Setipa Bidang Mengajukan Nota Servis ke UA	Sub Bagian Umum & Aparatur	Mei
6	Sampai dengan bulan Maret belum melakukan pencairan ATK	Pengajuan di Bulan April	Dikelola	Revisi RAK	Sub Bagian Umum & Aparatur	Mei
	Sampai dengan bulan Maret belum melakukan pencairan Honor Petugas Aduan		Dikelola	Revisi RAK, SK disampaikan ke Kasubag UA dan Kasubag UA mengingatkan	Sub Bagian Umum & Aparatur	Mei
7	Sampai dengan bulan Maret belum melakukan pencairan STNK	Sudah dicairkan anggaran sebesar Rp13.062.500	Dikelola	Mengingatkan petugas peyimpan barang, Indikator ditambah point/ target BBM dan Suku Cadang/ Service	sub Bagian Umum & Aparatur dan Program	Mei

No	Risiko (Prioritas)	Kegiatan Pengendalian Yang Sudah ada	Kegiatan Pengendalian		Penanggung Jawab	Target Waktu/ Link Evidence
			Respon Risiko	Rencana Kegiatan Pengendalian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8	Baru Triwulan I namun Realisasi Kasus pelanggaran Perda sudah mencapai 104,17%		Dikelola	Melakukan Revisi Target	Bid. Penegakan dan Operasi	Mei
9	Belum merealisasikan kegiatan Pelatihan Dalmas		Mengurangi Resiko	Bulan Juni dilaksanakan	Bid. Peningkatan Kapasitas Personil	Juni
10	Koordinasi antar instansi belum maksimal		Mengurangi Resiko	Melakukan Rapat Koordinasi	Bid. Penegakan dan Operasi	Triwulan II
11	Kurangnya Ketaatan Masyarakat terhadap Perda	Pembinaan dan Penindakan	Mengurangi Resiko	Melakukan Sosialisasi, Pembinaan dan Penindakan	Bi. Penegakan dan Operasi	Sepanjang Tahun
12	Tidak Adanya Tenaga PPNS		Dikelola	Membuat Nota Dinas Kepada Pimpinan	Sekretaris	Agustus
13	Peralatan dan Perlengkapan Operasional Belum memadai (HT, Senter, Mobil Dalmas,	Diusulkan di Renja setiap Tahun	Mengurangi Resiko	Membuat Nota Dinas Kepada Pimpinan	Sekretaris	Agustus
14	Perda 1978 yang sudah tidak relevan dengan kehidupan Sosial Kemasyarakatan	Sudah ada Draf yang sudah dibahas ditingkat OPD dan pihak terkait	Dikelola	Publik Hearing	Bid. Penegakan dan Operasi	Juni
15	Tingkat minat masyarakat untuk menjadi anggota Linmas sangat kurang	Pelatihan Linmas dan Pembinaan Linmas	Mengurangi Resiko	Selesai	Bid. Perlindungan Masyarakat dan PKP	https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/satpolpp/pelatihan-2021/ https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/pembinaan-potensi-linmas-desa-2021/
16	Kurangnya peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan	Pembinaan dan Pelatihan Linmas	Mengurangi Resiko	Pelatihan Linmas dan Pembinaan Linmas	Bid. Perlindungan Masyarakat	
17	Tidak adanya peralatan dan perlengkapan Linmas		Mengurangi Resiko	Menyurati Pimpinan	Bid. Perlindungan Masyarakat	
18	Tingkat Minat Anggota Pol PP untuk mengikuti Tes Jabatan Fungsional tidak ada		Mengurangi Resiko	Pembagian Tugas proporsional dan Membuat Sprint tanpa pembayaran (Khusus Jafung)	Bid. Penegakan dan Operasi	Sepanjang Tahun
19	Anggota tidak hadir mengikuti kegiatan Kesamaptaan/ Dalmas		Mengurangi Resiko	Reward and Punishment	Bid. Peningkatan Kapasitas Personil	

No	Risiko (Prioritas)	Kegiatan Pengendalian Yang Sudah ada	Kegiatan Pengendalian		Penanggung Jawab	Target Waktu/ Link Evidence
			Respon Risiko	Rencana Kegiatan Pengendalian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
20	Anggota Linmas Desa tidak pernah menyampaikan Laporan Kegiatan		Mengurangi Resiko	Pembinaan, Sosialisasi dan Pelatihan Linmas	Bid. Perlindungan Masyarakat dan PKP	
21	Proses pencairan anggaran yang belum dipahami		Dikelola	SOP Pencairan	Sub Bagian Keuangan	Mei
22	Pencairan perjalanan dinas lambat		Dikelola			

Keterangan :

Kolom (2) : diisi dengan prioritas risiko yaitu risiko dengan status risiko tinggi dari sheet Penilaian Risil

Kolom (3) : diisi dengan pengendalian yang sudah ada di OPD (Dapat berupa SOP, pedoman ataupun Pengendalian Lainnya

Kolom (4) : diisi dengan Respon Risiko berupa: "dikurangi, dikelola, menghindari risiko"

Kolom (5) : diisi dengan rencana penanganan berupa serangkaian tindakan untuk menghilangkan akar permasalahan dari faktor penyebab

Kolom (6) : diisi dengan petugas yang kompeten/bidang pemilik risiko sesuai permasalahan yang akan ditangani

Kolom (7) : diisi dengan target waktu implementasi rencana kegiatan pengendalian

Putussibau, Maret 2022
 KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 KABUPATEN KAPUAS HULU,

BAHTIAR, S.P., M.Si.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19671010 199703 1 007